PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ASA MANDIRI DALAM MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA PULAU PADANG KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan strata satu program studi ilmu Administrasi negara

Oleh:
FERNANDO
NPM. 180411025

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL	**: PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ASA MANDIRI DALAM MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA PULAU PADANG KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**
NAMA	**: FERNANDO**
NPM	**: 180411025**
PROGRAM STUDI	**: ADMINISTRASI NEGARA**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING 1	**PEMBIMBING II**
SAHRI MUHARAM, Sos., M.SI	**Drs.H.SUMARLI,MM**
NIDN. 1021117906	**NIDN. 8869490019**

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

EMILIA EMHARIS, S.Sos, M.Si
NIDN. 1002059002

PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 30
Bulan : Agustus
Tahun : 2022

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
SAHRI MUHARAM, Sos., M.SI	**Drs.H.SUMARLI,MM**
NIDN.1030058402	NIDN.1008128002

1. DESRIADI, S.Sos.,M.Si
2. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
3. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

MOTTO

"Perjalan seribu mil dimulai dengan satu langkah"

"Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, mermperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan"

"Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi tetapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik"

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan selalu dalam lindungan-Nya. Semoga ini menjadi salah satu langkah untuk menuju kesuksesan dan meraih cita-cita besarku.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk cahaya hidupku Ayahanda Bahalis dan ibuku tercinta Erni Wati, yang selalu memberiku semangat dan memanjatkan do'a kepada putramu dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk Ayah dan ibu pengorbananmu sungguh luar biasa. Serta seluruh anggota keluarga yang selalu mendoakan dan memberi dukungan.

Terima kasih banyak untuk Bapak dan Bapak yang telah banyak meluangkan waktu , tenaga dan pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan bantuan dalam proses bimbingan. Dan kepada Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan tambahan ilmu, bantuan administrasi dan bantuan lainnya dalam kelancaran studi peneliti.

Terima kasih banyak untuk semuanya karena jasa kalian sangat berharga bagi saya. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa berguna di masa yang akan datang. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Swt, karena dengan RidhoNyalah penulis dapat menyelesaikan Proposal dengan judul.

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA(BUMDes) ASA MANDIRI DALAM MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA PULAU PADANG KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segela pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Sahri Muharam, S.Sos., M.Si. Selaku dosen Pembimbing I yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini.
5. Bapak Drs.H. Sumarli, MM dosen Pembimbing II yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banya membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.

7. Orang Tua Penulis Ayahanda dan Ibunda serta seluruh anggota keluarga saya yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan sepenuh ketulusan penulis berharap semoga Proposal ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, 11 AGUSTUS 2022

FERNANDO

NPM. 180411025

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) ASA MANDIRI DALAM MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA PULAU PADANG KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh

Fernando
NPM. 180411025

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan badan usaha milik desa (BUMDes) asa mandiri dalam memberdayakan perekonomian masyarakat di Desa Pulau Padang. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran badan usaha milik desa (BUMDes) asa mandiri dalam memberdayakan perekonomian masyarakat di desa pulau padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini sebanyak 12 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengambilan sumber data primer berasal dari wawancara dan sumber daya sekunder berasal dari arsip dan dokumen-dokumen. Fokus penelitian dalam skripsi ini mengenai peran Badan Usaha Milik Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui. Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) asa mandiri dalam memberdayakan perekonomian masyarakat di Desa Pulau Padang. Sudah tercapainya Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Baik Sekali.

Kata Kunci : Peranan,Memberdayakan, dan BUMDes

THE ROLE OF VILLAGE OWNED BUMDes (BUMDes) ASA MANDIRI IN EMPOWERING THE COMMUNITY ECONOMY IN VILLAGE ISLAND PADANG SINGINGI DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY

By

Fernando
NPM. 180411025

This research was conducted at the Pulau Padang Village Office, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. This study aims to determine how the role of independent village-owned enterprises (BUMDes) in empowering the economy of the community in Pulau Padang Village. To find out and analyze how the role of village-owned enterprises (BUMDes) as independent in empowering the economy of the community in Pulau Padang Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. The type of research conducted is descriptive qualitative. The informants of this research were 12 people using purposive sampling technique. The primary data sources were taken from interviews and secondary sources came from archives and documents. The focus of the research in this thesis is on the role of the Pulau Padang Village Owned Enterprise, Singingi District. Based on the results of research in the field can be known. The role of independent village-owned enterprises (BUMDes) in empowering the economy of the community in Pulau Padang Village. The Role of Village Owned Enterprises (BUMDes) has been achieved very well.

Keywords: Role, Empowering, and BUMDes

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO ..... **i**

KATA PERSEMBAHAN ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 9

1.3 Tujuan Penelitian 10

1.4 Manfaat Penelitian 10

1.4.1 Manfaat Teoritis 10

1.4.2 Manfaat Praktis 10

1.5 Kegunaan Penelitian 11

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori 11

2.1.1 Konsep Administrasi Negara 11

2.1.2 Konsep Kepemimpinan 17

2.1.3 Konsep Pemerintahan Desa 19

2.1.4 Konsep Peran 22

2.1.5 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 23

2.1.6 Konsep Pemberdayaan 30

2.2 Hipotesis Penelitian 36

2.3 Kerangka Pemikiran 36

2.4 Defenisi Operasional 37

2.5 Operasional Variabel 38

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 40
3.2 Informan Penelitian 40
3.3 Sumber Data 42
3.3.1 Data Primer 42
3.3.2 Data Sekunder 42
3.4 Fokus Penelitian 42
3.5 Lokasi Penelitian 42
3.6 Metode Pengumpulan Data 42
3.6.1 Observasi 43
3.6.2 Wawancara 43
3.6.3 Dokumentasi 43
3.6.4 Tringulasi 43
3.7 Metode Analisis Data 44
3.7.1 Pengumpulan Data 44
3.7.2 Redukasi Data 44
3.7.3 Penyajian Data 45
3.7.4 Pengambilan Keputusan Atau Vertifikasi 45
3.8 Jadwal Penelitian 46

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Pulau Padang 47
4.2 Letak Geografis Desa Pulau Padang 47
4.2.1 Batas Wilayah 48
4.2.2 Luas Wilayah 48
4.3 Letak Demografi Desa Pulau Padang 49
4.3.1 Agama 49
4.3.2 Kebudayaan 50
4.3.3 Pendidikan 50
4.3.4 Kesehatan 51
4.3.5 Pemerintah Desa 52
4.4 Visi Dan Misi Desa Pulau Padang 52

4.4.1 Visi 52
4.4.2 Misi..... 52
4.5 Struktur Organisasi..... 54
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5.1 Identitas Responden 55
5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... 55
5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia..... 56
5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Jabatan diBumdes 56
5.1.4 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 57
5.2 Hasil Dan Pembahasan Penelitian..... 57
5.2.1 Indikator 59
VI. PENUTUP
6.1 Kesimpulan..... 71
6.2 Saran..... 71
6.2.1Pemerintah Desa..... 71
DAFTAR PUSTAKA 73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan

"Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat"

Di dalam berbagai bidang kehidupan manusia, pemerintah memainkan peran yang sangat penting. Peran yang dimainkan oleh pemerintah tersebut bisa berupa fungsi sebagai pengatur sehingga tata tertib kehidupan manusia dapat tercipta lewat peran tersebut. Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat sehingga masyarakat bisa mengalami kehidupan yang wajar. Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang

besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Di Indonesia desa memiliki beragam adat dan budaya, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang disebut dengan *self-governing community* (Eko, 2008).

Banyak faktor yang meyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Berbagai programpun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai,

kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam "kegotong-royongan" yang saat ini sudah mulai terkikis. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing.

Diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah pemberdayaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional dan bahkan program nasional. Pemahaman ini menunjukan bawa

program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan.

Menurut penulis dapat disimpulkan, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Begitu pula yang dimaksud dalam pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu upaya yang dilakukan oleh pengelola BUMDes dan pemerintah desa dengan mengadakan pelatihan untuk masyarakat dalam mengembangkan usaha sehingga masyarakat mampu untuk memberdayakan dirinya sendiri.

Istilah BUMDes tersebut juga pertama kali muncul melalui PP No 72/2005 tentang pemerintah desa. Upaya tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang berbunyi:

"Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa." Sebagai lembaga usaha desa, BUMDes dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa

dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa".

BUMDes berfungsi untuk menstimulus, memfasilitasi, dan melindungi serta memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Bumdes berperan mengatur perekonomian yang ada didesa sehingga BUMDes dibangun sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat itu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan maksud dari pendirian BUMDes tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksud untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan dari pendirian BUMDes adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan pedesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa.

Disamping itu pendirian BUMDes ini mempunyai sasaran yaitu terlayaninya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes mempunyai 4 (empat) tujuan utama yaitu:

(a) Meningkatkan perekonomian desa

(b) Meningkatkan pendapatan asli desa

(c) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat

(d) Meningkatkan pembangunan desa, pemberdayan Masyarakat Desa, pemberian bantuan untuk Masyarakat Miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan melalui APBD

Pendirian BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisifatip, emansifatif, transparasi, akuntabel, sustainable. Oleh karana itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efesien, propesional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Dinyatakan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut;

(a) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok

(b) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal

(c) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat

(d) Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu dilakukan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan sasaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat tercapai jika Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola secara terarah dan professional. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat mendorong dan menggerakan perekonomian desa dan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan asli Desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Jika Pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes.

Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan). Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi

dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya.

Desa Pulau Padang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pulau Padang telah dibentuk BUMDes yaitu BUMDes Asa Mandiri. Pendirian BUMDes Asa Mandiri Desa Pulau Padang diprakarsai oleh masyarakat dan potensi desa yang ada. Maksud dari potensi desa adalah adanya kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa yang paling banyak dilakukan atau paling mendominasi dari kegatan-kegiatan yang lain.

Usaha BUMDes Asa Mandiri yang berjalan di Desa Pulau Padang yaitu usaha koperasi penjualan pupuk dan racun untuk pertanian dan perkebunan. Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi utama yang ada di Desa Pulau Padang. Sebagaimana petani pada umumnya petani di Desa Pulau Padang menghadapi banyak permasalahan dalam meningkatkan hasil pertanian seperti, pengadaan pupuk, irigasi, alat pertanian, hama penyakit yang tinggi, pemasaran hasil pertanian dan harga produk yang tidak stabil.

Peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar

pendirian BUMDes dan mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial.

Dengan kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih termasuk hal yang baru dalam keberadaannya, maka tidak heran di dalam prakteknya masih ada beberapa kendala yang muncul terutama dalam segi pembentukan dan pengelolaan.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Dengan Lokasi Penelitian Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian harus dirumuskan masalah dengan jelas agar penelitian dapat di laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga jelas dari mana harus dimulai dan kemana harus pergi. Perumusan masalah juga diperlukan untuk mempermudah menginterpretasikan data dan fakta yang diperlukan dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Apa Saja Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

1.3.2 Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberdayaan yang diterapkan pemerintah dalam Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penilitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai suatu hasil karya ilmiah yang dapat menunjang ilmu penegetahuan, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilaksanakan tentunya mempunyai kegunaan, demikian pula halnya dengan penelitian yang penulis lakukan juga mempunyai kegunaan, yaitu: Sebagai bahan informasi bagi semua pihak yang memerlukan, baik sebagai bahan telaan studi lebih lanjut maupun sebagai bahan referensi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Konsep Administrasi Negara

a) Pengertian Administrasi dan Ilmu Administrasi

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai suatu metode, administrasi berlangsung dalam organisasi formal, yaitu suatu unit sosial yang dibentuk untuk tujuan yang mencakup unsur-unsur konflik dan unsur-unsur perubahan. Organisasi, dengan struktur formalnya, kelompok-kelompok sosial, lingkungan sosial, sumber-sumber dan tujuan-tujuan merupakan bahan dasar seorang administarstor bekerja. Tugas seorang administrator adalah melaksanakan pekerjaan melalui proses pengorganisasian sumber-sumber dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Dimock dan Dimock (dalam Anggara, 2012:144) administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Oleh sebab itu, ilmu administrasi Negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah tetapi juga bagaimana melakukannya. Administrasi Negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan Negara dalam suatu proses. Oleh sebab itu, sebagai suatu ilmu yang diperoleh dari kedua ilmu pengetahuan ini, administrasi Negara menghendaki dua macam syarat jika hendak dipa

Pertama,perlu mengetahui sesuatu mengenai administrasi umum. Kedua,harus diakui bahwa banyak masalah administrasi Negara timbul dalam kerangka politik.

Menurut Henri Fayol (1841-1925), Ilmu administrasi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang paling muda, lahir pada akhir abad ke-19. Henri Fayol (1841-1925), adalah seorang sarjana Prancis, yang pertama melihat adanya prinsip-prinsip universal yang berlaku bagi administrasi yang mana pun dan dimana pun. Henri Fayol membawakan pengertian "administrasi (Peradminstration) yang umum berlaku di daratan Eropa (Eropa Kontinental), dikalangan bangsa Italia, Spanyol, Prancis, jerman, Belgia, Belanda dan sebagainya. Adapun di Inggris dan negara negara bekas jajahan Inggris, termasuk Amerika Serikat, pengertian semacam itu tidak ada. Yang mirip-mirip adalah "Manajemen" Oleh karena itu, buka Henri Fayol "*Administration Industrielle at "Industrial and general management*", suatu terjemahan yang jelas bagi orang Inggris, tetapi membingungkan bagi kita di Indonesia yang menganut pandangan Eropa Kontinental sebagai bekas jajajan Belanda.

Menurut penulis ilmu administrasi ini merupakan suatu metode acuan dalam melaksanakan suatu organisasi yang fomal yang berlaku untuk mencapai target suatu organisasi tersebut.

b) Unsur-Unsur Administrasi

Dalam proses opearsi adminitrasi terdapat sejumlah unsur yang saling berkait antara satu dan yang lain, yang apabila salah satunya tidak ada, proses administrasi akan pincang. Unsur-unsur tersebut meliputi sebagai berikut :

(a) Organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja sama

(b) Manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan mengarahkan fasilitas kerja, hubungan ini meliputi:

(1) Perencanaan

(2) Pembuatan Keputusan

(3) Pembimbingan

(4) Pengoordinasian

(5) Pengawasan (*kontrol*)

(6) Penyempurnaan dan perbaikan tata struktur dan tata kerja

(c) Komunikasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah pikiran dari seseorang kepada yang lainnya dalam rangka terwujudnya kerja sama.

(d) Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai atau karyawan yang diperlukan

(e) Keuangan, yaitu pengelolaan segi-segi pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan

(f) Perbekalan, yaitu perencanaan, pengadaan dan pengaturan pemakai barang-barang keperluan kerja

(g) Tata Usaha, yaitu penghimpun, pencatatan, pengolahan, pengiriman, dan penyimpanan berbagai keterangan yang diperlukan

(h) Hubungan Masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerja sama

c) Ilmu Administrasi Negara

Ilmu admnistarsi Negara adalah Ilmu Pengetahuan (cabang ilmu admnistrasi) yang secara khas melakukan studi (kajian) terhadap fungsi intern dan ekstern struktur-struktur dan proses-proses yang terdapat di bagian yang sangat penting daripada sistem dan aparatur pemerintahan. Secara singkat, disebut administrasi Negara. Dalam bahasa Inggris Amerika disebut *public administration*, namun lebih tepat disebut *state administration*, dan dalam Bahasa disebut *openbaarr bestuur*.

Menurut Anggara (2012:134) administrasi negara adalah bagian dari administrasi umum yang mempunyai lepangan yang lebih luas, yaitu ilmu pengertahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa digerakan dan dikemudikan. Oleh karena itu, ilmu administrasi Negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana melakukannya. Sejalan dengan pendapat diatas. Menurut Thoha (1997:10) mengemukakan bahwa ilmu Administrasi Negara diturunkan dari ibu administrasi dan ayah politik. Dengan demikian, pengetahuan administrasi yang diterapkan dalam kegiatan politik atau Negara atau pemerintahan itulah administrasi Negara.

Menurut Robbins (1983:9) mengemukakan bahwa adminstrasi adalah keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dan melalui orang lain.

Menurut Waldo (1996:17) mendefinisikan administrasi Negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Selain itu, administrasi Negara merupakan seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan urusan Negara.

Dapat dikatakan bahwa istilah *Public administration* atau "*the administration*" dalam arti *openbaar besttur* lahir di Amerika Serikat dalam tahun 1887 dari Woodrow Wilson. Pengertian lebih lanjut mengenai administrasi Negara akan dibahas dalam bab berikutnya.

Dalam bahasa sehari-hari, administrasi Negara disebut juga pemerintahan. Asalkan tidak dicampuradukkan dengan pemerintahan yang sifatnya eksekutif atau politik kenegaraan. Di kalangan departemen kehakiman dan badan-badan pengadilan beredar istilah "tata usaha Negara" sebagai konsekunsi (karena sudah terlanjur disebut demikian) dari pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tetang Kekuasaan Kehakiman, Istilah " tata usaha Negara" berasal dari tahun 1948 pada saat 0rang belum mengenal istilah public administration. Menurut Pasal 1, ad.1, Undang-undangn Nomor 5 Tahun 1986, yang dimaksud dengan Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

Menurut Penjelasannya yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif. Secara umum, eksekutif, berarti *policy making* (*executive Officer* adalah *policy maker*), sedangkan "admnistratif berarti "*objective*" *plant or action decision making*.

Menurut Muhammad (2019) Ilmu pemerintahan dalam arti luas terdiri dari, Ilmu pemerintahan yang merupakan bagian dari ilmu politik dan Ilmu administrasi negara yang merupakan bagian dari ilmu administrasi. Sedangkan

Ilmu pemerintah (dalam arti sempit), atau *the science of government*, merupakan bagian dari politikolgi atau ilmu politik. Ilmu pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang secara khas melakukan studi terhadap fungsi pemerintahan dalam suatu negara, terhadap struktur-struktur dan proses-proses kepolitikan yang terdapat di kalangan pejabat pemerintah di dalam atau pada waktu mereka memberikan arah pada jalan dan perilaku negara, baik intern dalam negeri maupun ekstern luar negeri.

Dari beberapa penjelasan di atas penulis simpulkan ilmu pemerintahan suatu seni yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ikut serta dalam urusan pemerintahan. Bukan hanya untuk menjalankan urusan pemerintah akan tetapi paham bagaimana juga melakukan dengan baik dan bisa mencapai tujuan bersama.

2.1.2 Konsep Kepemimpinan

a) Pengertian Kepemimpinan

Menurut Kristiadi (1996) Kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks dimana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas, atau objektif-objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Seorang pemimpin itu melakukan proses ini dengan mengaplikasikan sifat-sifat kepemimpinan dirinya yaitu kepercayaan, nilai, etika, perwatakan, pengetahuan, dan kemahiran kemahiran yang dimilikinya. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk

bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kepemimpinan adalah suatu proses bagaimana menata dan mencapai kinerja untuk mencapai keputusan seperti bagaimana yang diinginkannya. Kepemimpinan adalah suatu rangkaian bagaimana mendistribusikan pengaturan dan situasi pada suatu waktu tertentu.

Menurut Harbani (2008) Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan yang sama dan terarah pada pencapaian tujuannya. Kepemimpinan juga merupakan proses menggerakkan grup atau kelompok dalam arah yang sama tanpa paksaan.

Kepemimpinan (*leadership*) merupakan inti sari manajemen. Dengan kepemimpinan yang baik, proses manajemen akan berjalan lancar dan karyawan bergairah melaksanakan tugas-tugasnya. Gairah kerja, produktivitas kerja, dan proses manajemen suatu perusahaan akan baik, jika tipe, gaya, cara atau style kepemimpinan yang diterapkan manajernya baik.Tegasnya baik atau buruknya, tercapai atau tidaknya tujuan suatu perusahaan sebagian besar ditentukan oleh kecakapan manajer dalam melaksanakan kepemimpinannya untuk mengerahkan para bawahannya.

2.1.3 Konsep Pemerintah Desa

Menurut Nurcholis (2011) dalam Pelaksanaan pemerintahan desa dilakukan pemerintah desa dan Badan Usaha Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
    1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretariat desa
    2) Unsur pelaksanaan teknis, unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dll
    3) Unsur kewilayaan, pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, kepala desa mempunyai wewenang:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaraan Desa (BPD).
b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
e. Membina kehidupan masyarakat desa.
f. Membina perekonomian desa.

g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
h. Mewakili desanya dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban:

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (KKN)
f. Menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja pemerintahan desa
g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik
i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keungan desa
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenganan desa
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selain itu kepala desa juga berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati / Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dalan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah. Agar fokus ke pelayanan masyarakat, kepala desa dilarang:

a. Menjadi pengurus PARPOL
b. Merangkap jabatan ketua dan atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan
c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD
d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah
e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain

f. Melakuakan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
g. Menyalahgunakan wewenang
h. Melanggar sumpah janji/jabatan

2.1.4 Konsep Peran

Moejiarto, 2007 menjelaskan bahwa aspek peran yang dinamis dalam kedudukan sesuatu. Jika melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka disebut menjalankan suatu peran. Perilaku analisis peranan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu (1) ketentuan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang membawa perannya. (2) Gambaran peranan yaitu suatu gambaran perilaku yang secara aktual ditampilkan dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut kesimpuln mengenai pengertian peranan yaitu peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat.

Menurut Sarjono Soekanto (2004) bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Menurut Poerwadarminta (1976) mengatakan arti dari peran adalah sebagai berikut: peran merupakan aktor yang diperankan dalam sandiwara disebut juga pemain utama, peran yaitu bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam permainan sandiwara.

Menurut pendapat Soekanto (2004) peran dapat mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

(a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat

(b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi

(c) Peranan juga dapat dikatakan perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Siagian (2001) menyebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

(a) Sebagai stabilisator

(b) Sebagai innovator

(c) Sebagai pelopors

Menurut penulis peran ialah suatu tindakan yang sesuai akan kewajiban dan hak yang di miliki. Kewajiban dan hak ini bermanfaat serta memberikan efek yang maksimal kepada apa yang telah dilakukan.

2.1.5 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a) Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pedidikan Nasional (2007) BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak

menciptakan model usaha yang di hegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).

Beberapa pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya:

(a) BUMDes merupakan salah satu stategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (kementerian desa KDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut desa tradisi berdesa).

(b) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.

(c) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia didesa.

(d) BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Badan usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan gula mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdaasarkan kebutuhan potensi desa (Anom, 2015).

BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV, atau Koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan desa dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggara pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Meurut Anom (2015) Karakteristik dari BUMDes terhadap lembaga ekonomi lainnya. Perbedaannya itu antara lain:

(a) Modal usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
(b) Dana usaha bersal dari desa 51% dan dari masyarakat 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil).
(c) Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
(d) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan kepada potensi dan hasil informasi pasar.
(e) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertaan modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
(f) Difasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan pemdes.

(g) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD dan Anggota).

b) Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Berikut ini tujuan BUMDes yaitu:

(a) Meningkatkan perekonomian desa,

(b) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa,

(c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,

(d) Mengembangkan rencana kerja sama usah antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.

(e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.

(f) Membuka lapangan kerja.

(g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan

(h) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai lembaga ekonomi produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan membawa manfaat tersendiri bagi desa yang

mendirikannya. Selain untuk peningkatan pendapatan asli desa, BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c) Prinsip-Prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

(a) Prinsip BUMDes

(1) BUMDes bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatannya.

(2) BUMDes adalah bersifat sosial (*Social interpreunership*), tidak semata-mata mencari keuntungan.

(3) BUMDes harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelola tidak boleh dari unsur pemerintah desa.

(4) BUMDes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah jalan tetapi bagaimana bumdes mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas usaha mereka.

(b) Prinsip umum pengelola BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan bumdes penting untuk dielaburasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Prinsip tersebut adalah:

(1) Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

(2) Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau meminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

(3) Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

(4) Trasparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui dalam segenap lapisan masyarakat dengan mudah terbuka

(5) Akuntable, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

(6) Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

d) Pembentukan BUMDes

Tujuan awal pembentukan badan usaha milik Desa (BUMDes) dimaksud untuk mendorong atau menampung sekuruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalisasikan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumberdaya manusia.

Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang

berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Perubahan/sikap dan cara pandang masyarakat merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari. kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan sebagai wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan publik ditingkat lokal agar lebih berorientasi kemasyarakat miskin dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman, maupun sosial (Kessa, 2015).

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai 3 tahun. Tujuannya agar pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan dewan komisaris BUMDes. Poin lain yang juga dibahas adalah melakukan proses rekruitmen dan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan

orang-orang yang akan menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara Musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Selain tahap-tahap pembentukan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan BUMDes di antaranya yaitu:

(a) Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
(b) Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
(c) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
(d) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, tertama kekayaan desa.
(e) Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
(f) Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakay yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
(g) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa (Buku Panduan Pendirian BUMDes).

2.1.6 Konsep Pemberdayaan

(1) Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari

empowerment menurut Merrian Webster dalam Oxford English Dicteonary mengandung dua pengertian yakni, "*To give ability or enable to*", artinya "memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan". Dan "*Togive power of authority to*", artinya"memberi kekuasaan". Hakikat dari konseptualisasi empowerment berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu "melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan" dan "memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan". Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan.

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang mendapat awalan ber yang menjadi kata "berdaya" artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

Sumodiningrat (1999: 66), bahwa peran BUMDes memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat potensi kemampuan yang mereka miliki.

Pada sisi lain, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukandan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005) ada lima macam, yaitu: 1. Pendekatan dari bawah (buttom up approach): pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. 2. Partisipasi (participation): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan. 3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi. 4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional. 5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Menurut Totok dan Poerwoko (2012) istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkunganya agar dapat memenuhi keinginan-keinginanya, termasuk aksesbilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaanya, aktivitas sosialnya, dll.

Menurut Chatarina Rusmiyati (2011) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan

orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupanya.

Sedangkan menurut Ambar Teguh (2004) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya.

Menurut *Schumacer* dalam Ambar Teguh S, (2004), memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural terlebih dahulu Prinsip pemberdayaan menurut *Mathews* dalam Totok dan Poerwoko (2012) menyatakan bahwa Prinsip adalah suatu pernyataan tentang Kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten.

Penjelasan beberapa ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses menuju peningkatan kemampuan serta menciptakan kemandirian masyarakat sehingga potensi yang dimiliki masyarakat berkembang dan mampu bersaing dengan dunia luar. Dan hal ini dapat terwujudnya kemadirian dalam pembangunan terutama pembangunan pada desa.

Dengan upaya peningkatan kemampuan potensi masyarakat desa sangat penting dimana selain bisa bersaing dengan masyarakat lainnya, juga bisa mengembangkan kemampuan baik dibidang ekonomi, sosial, agama maupun budaya sehingga masyarakat desa tidak lagi tertinggal jauh dari masyarakat kota yang lebih maju. Dan dengan pemberdayaan ini juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat desa.

(2) Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

(a) Adanya kebutuhan Kebutuhan mencakup kebutuhan bersama dipenuhi secara bersama pula, rasa ikut tanggung jawab atau memiliki dan rasa saling memiliki.

(b) Keikutsertaan Meliputi kesadaran berkembang untuk berperan serta, meningkatkan keinginan untuk memakai sumber-sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama, makin mendorong untuk ikut serta dalam pembangunan yang lebih luas, masyarakat dapat segera memperoleh informasi dan berkembangnya keterampilan.

(c) Kesesuaian tujuan Kesesuaian tujuan mencakup menumbuhkan semangat dan jiwa kebersamaan yang konstruktif.

(d) Koperatif artinya memupuk kesadaran untuk saling bekerjasama, mengembangkan rasa kekeluargaan dan memperkokoh kelompok dalam mencegah perpecahan.

Menurut Drijver dan Sajise (Dalam Sutrisno 2005) prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat ada lima macam, yaitu:

(a) Pendekatan dari bawah (*buttom up approach*). Pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

(b) Partisipasi (*participation*), dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.

(c) Konsep keberlanjutan yang merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

(d) Keterpaduan, yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.

(e) Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Oleh sebab itu, dapat simpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.

2.2 Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini perlu diberikan hipotesis di aman hipotesis ini merupakan dugaan sementara. Adapaun hipotesis dalam penelitian ini adalah **"*dDiduga bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi"*.**

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penlitian ini dapat digambarkan pada gambar di bawah ini:

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Perananan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

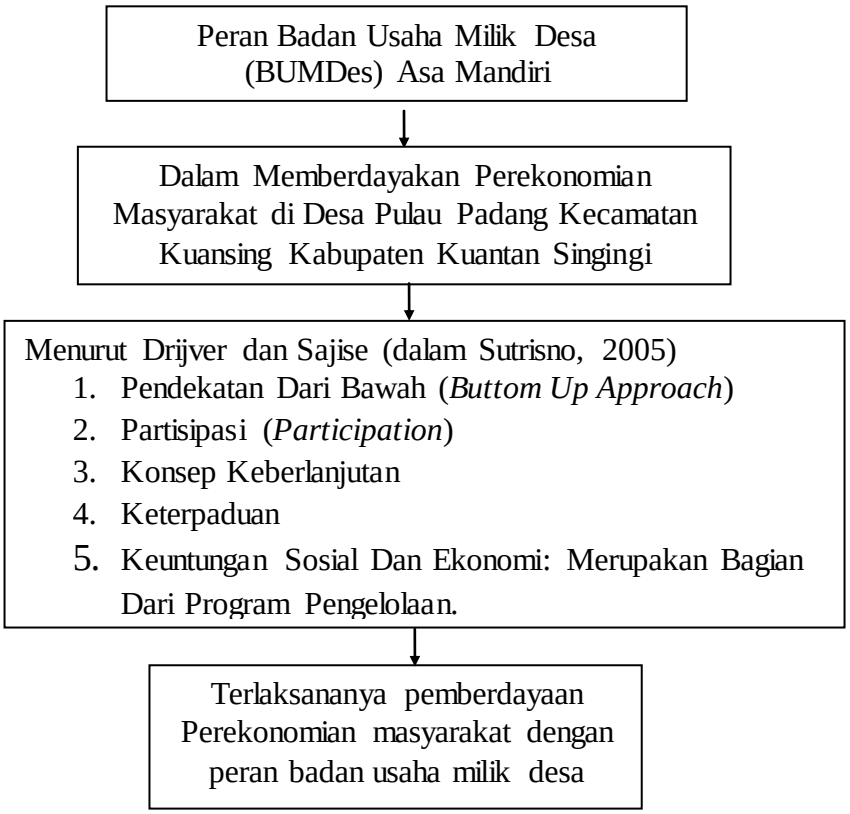

Sumber : Modifikasi penulis Tahun 2021

2.4 Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman beberapa indikator ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan indikator operasional sebagai berikut:

2.4.1 Pendekatan Dari Bawah (*buttom up approach*)

Kondisi dimana pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2.4.2 Partisipasi (*participation*)

Setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.

2.4.3 Konsep Berkelanjutan

Merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

2.4.4 Keterpaduan

Kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.

2.4.5 Keuntungan Sosial dan Ekonomi

Merupakan bagian dari program pengelolaan

2.5 Operasional Variabel

Adapun operasional variabel penelitian dalam penelitian mengenai Perananan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

Tabel II.1 Operasional Variavbel Penelitian Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pemberdayaan merupakan perubahan sosial dari tidak mampu menjadi mampu serta	Pemberdayaan Perekonomian masyarakat	Pendekatan Dari Bawah (*Buttom Up Approach*)	bagaimana melakukan pendekatan kepada masyarakat dan membuat masyarakat ikut serta dalam

memiliki kekuasan sendiri. Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005)			pemberdayaan yang dilaksanakan
		Partisipasi (*Participation*)	bagaimana pemerintah desa dalam mengikutsertakan masyarakat yang akan diberikan pemberdayaan
		Konsep Keberlanjutan	Memahami lingkungan, konteks dan kapasitas dari suatu organisasi, karena strategi yang paling baik adalah strategi yang memiliki kecocokan dengan lingkungan yang ada, yang kemudian berjalan dengan banyaknya kemungkinan yang dimiliki.
		Keterpaduan	a. Apa saja kebijakan yang dilakukan pemerintah desa dalam pelaksanaan strategi di pemerintahan desa b. Apa saja langkah yang dibutuhkan pemerintah desa dalam pelaksanaan tindakan strategi
		Keuntungan Sosial Dan Ekonomi: Merupakan Bagian Dari Program Pengelolaan.	Bagaimana mempelajari sistem untuk memahami, tidak hanya

			tindakan mana saja yang berhasil atau tidak, namun juga apakah perlu dilakukan pemikiran ulang atas tujuan, analisis, dan arah yang dipilih.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus secara mandalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertenrtu, metode adalah suati prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum.

Model penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh sugiyono (2009) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah sumber informasi yang diproleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses tugas dan fungsi di pemerintahan desa Pulau Padang dan pengelola BUMDes. Informan yang merupakan orang yang dapat memberikan informasi dalam situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Menurut Bagong Suyanto (2005) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

(1) Informan kunci (*key informant*)

Merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ariando sebagai kepala desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Teknik pengambilan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling tecknique* yaitu cara penentuan informasi yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu, yaitu melalui orang-orang yang terlibat langsung dalam proses tugas dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelititan ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 Key Informan dan Informan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala desa	1 orang	Key informan
2	Sekretaris desa	1 orang	Informan
3	Direktur BUMDes Asa Mandiri	1 orang	Informan
4	Kepala Unit Usaha BUMDes Asa Mandiri	1 orang	Informan
5	Staf keuangan BUMDes Asa Mandiri	1 orang	Informan
6	Ketua BPD	1 orang	Informan
7	Masyarakat	6 orang	Informan

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Padang

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung terdiri dari beberapa indikator yang memperoleh hasil analisa yang jelas juga hasil penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder data pendukung yang penulis peroleh di BUMDes Asa Mandiri Desa Pulau Padang

a. Gambaran umum BUMDes Desa Pulau Padang
b. Data tentang pengeluaran dan pendapatan pada BUMDes Asa Mandiri Desa Pulau Padang

3.4 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini di Pemerintahan Desa dan BUMDes Asa Mandiri Pulau Padang

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan penulis menggunakan teknik pengumpulan data karena mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

3.6.1 Observasi

Proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.6.2 Wawancara

Merupakan proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi gagasan berkaitan erat dengan penelitian ini.

3.6.3 Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pengambilan alih dokumen yang berhubungan dengan msalah yang akan di teliti (Sugiyono, 2008).

3.6.4 Triangulasi

Menurut Newman (2000:186) tringulasi adalah mengukur jarak antar objek dengan melakukan pengamatan dari beberapa posisi. Dengan mengamati objek dari beberapa sudut pandang yang berbeda, para surveyor dapat memperoleh objek yang benar.

Norman K. Denkin (dalam Mudjia Rahardjo, 2012:35) mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.

3.7 Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh dianalisis dalam kata-kata lisan maupun tulisan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur kemudian memperjelas hasil penelitian. Prosedur analisis dilakukan dengan berbagai tahapan yang meliputi: data reduction (reduksi data), data display (penyajian data). Setelah data direduksi kemudian dibuat dalam bentuk uraian naratif, sehingga data tersebut betul-betul dipahami, dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan (Arikunto, 2010).

Analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara bersamaan melalui proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Humberman (2010:255) analisis data meliputi :

3.7.1 Pengumpulan Data

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

3.7.2 Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

3.7.3 Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3.7.4 Pengambilan keputusan atau verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan keputusan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Data pokok penelitian ini mengacu pada Pelayanan Publik yang diterima oleh masyarakat.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal penelitian tentang Perananan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kegiatan	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Juni	Juli	Agustus
1	Pengajuan judul											
2	Pembuatan proposal											
3	Bimbingan proposal											
4	Ujian proposal											
5	Revisi proposal											
6	Penelitian Lapangan											
7	Pengelolaan dan Analisa Data											
8	Penyusunan Laporan (Skripsi)											
9	Ujian Skripsi											
10	Revisi Skripsi											
11	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi											

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2022

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Pulau Padang

Pulau Padang adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Singingi, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Jarak dari ibu kota Kecamatan 2 Km, Jarak ke Ibu kota Kabupaten ±47,1 Km, sedangkan jarak ke Ibu kota Provinsi ±128 , jarak dari Ibu Kota Negara ±895 KM. Desa Pulau Padang memiliki potensi yang berlimpah, kayu alam, Hutan Industri, Batu Bara, Karet, Sawit, Emas dan Galian C, tak heran didesa ini berdiri salahsatu estate Perusahaan Kertas terbesar di Asia Tenggara yakni PT. RAPP. Di Desa ini juga berdiri perusahaan pengolahan galian C terbesar di Kuantan Singingi.

Desa Pulau Padang terdiri dari 2 (dua) dusun atau lingkungan, 2 (dua) Rukun Warga (RW) dan 5 (lima) Rukun Tetangga (RT). Dalam memberikan pelayan kepada masyarakat Desa Pulau Padang tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak, mulai dari Kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh lapisan masyarakat Desa Pulau Padang.

4.2 Letak Geografis Desa Pulau Padang

Desa pulau padang adalah salah satu desa di kecamatan singingi yang mempunyai luas wilayah ± 18765 ha. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, desa pulau padang secara umumnya beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 32,60c – 36,50c dan suhu minimum berkisar antara 19,20c -22,00c dengan curah hujan antara 74,00-327,50 mm pertahun. Desa pulau padang terdiri dari 2

(dua) dusun atau lingkungan, 2 (dua) rw dan 5 (lima) rt. Orbitasi dari desa pulau padang dengan ibu kota kecamatan ±2 km, dengan ibu kota kabupaten ±47,1 km, dan dengan ibu kota provinsi ±128 km.

4.2.1 Batas Wilayah

Batas-batas administratif pemerintahan desa pulau padang kecamatan singingi sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan muara lembu kecamtan singingi
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa pangkalan indarung
3. Sebelah barat berbatasan dengan pt.rapp
4. Sebelah timur berbatasan dengan dengan kelurahan muara lembu kecamatan singing

4.2.2 Luas Wilayah

Tabel IV.1 Luas Wilayah Desa Pulau Padang

No	Keterangan	Luas
1	Luas Tanah Pertanian	10 Ha
2	Luas Tanah Kering	8 Ha
3	Luas Tanah Basah	0,00 Ha
4	Luas Tanah Hutan	10 Ha
5	Luas Fasilitas Umum	20 Ha
Total Luas		48 Ha

Sumber : Data Desa Pulau Padang 2021

Berdasarka tabel diatas dapat di ketahui bahwa luas tanah pertanian 10 Ha, luas tanah kering 8 Ha, luas tanah basah 0,00 Ha, luas tanah hutan 10 Ha, dan luas fasilitas umum yaitu 20 Ha. Jadi total keseluruhan luas wilayah desa Pulau Padang Kecamatan Singini Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 48 Ha.

Mata pencarian penduduk desa pulau padang terdiri dari:

Tabel IV.2 Mata Pencarian Masyarakat di Desa Pulau Padang

No	Mata Pencarian	Jumlah Orang
1	Petani dan perkebun	574
2	Pedagang	21
3	Pelajar/mahasiswa	120
4	Montir	3
5	Ibu rumah tangga	465
6	Tukang jahit	2
7	Imam masjid	11
8	Tukang	7
9	Guru	14
10	Bidan/perawat	12
11	PNS	14
12	Sopir / angkutan	15
13	Swasta	28

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Padang Tahun 2022

4.3 Letak Demografi Desa Pulau Padang

4.3.1 Agama

Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pasal 29 UUD 45. Negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaranagama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Pembinaankerukunan hidup umat beragama telah dilaksanakan melalui musyawarahkerukunan hidup bernegara danpertemuan antar pimpinan umat beragamadan pemerintah.Kesemarakan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan makinbanyaknya tempat peribadan, pembangunan tempat peribadatan yangsemakin berkembang.

Adapun sarana dan prasarana keagamaan yaitu:

Tabel IV.3 Agama di Desa Pulau Padang

Tempat Keagamaan	Jumlah
Mesjid	1
Mushola	2

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Padang Tahun 2022

4.3.2 Kebudayaan

Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Desa Pulau Padang merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada umunya adalah masyarakat melayu kuantan. Suku pendatang yang dominan diantaranya adalah suku Jawa yang datang ke Desa Pulau Padang melalui program transmigrasi. Pada umumnya suku Jawa mendiami wilayah yang terletak di daerah pedesaan atau perkebunan.

4.3.3 Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan sumber daya manusia menjadi berkualitas yang berada pada wilayah tersebut. Dalam meningkatkan pertumbuhan sumber daya manusia harus dibarengin dengan sarana dan prasarana yang mendukung serta tenaga pengajar yang professional.

Tabel IV.4 Lembaga Pendidikan di Desa Pulau Padang

Lembaga Pendidikan	Jumlah
TK	1
PAUD	1
MDA	1
SD	1

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Padang Tahun 2022

Adapun tingkat pendidikan pada masyarakat desa pulau padang dibagi atas 7 kelompok yaitu terdiri atas tidak sekolah, belum tamat SD, tidak tamat SD, Tamatan SD, tamatan SMP, tamatan SMA, dan perguruan tinggi.

Tabel IV.5 Keadaan Penduduk di Desa Pulau Padang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tamat perguruan tinggi	212	24
2	Tamatan SLTA	345	40
3	Tamatan SLTP	65	7
4	Tamatan SD	48	6
5	Tidak tamat SD	27	3
6	Belum tamat SD	148	17
7	Belum sekolah	25	3
Total		**872**	**100**

Sumber: Monografi Desa Pulau Padang Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kelompok tingkat pendidikan di desa pulau padang, tingkat pendidikan tamatan perguruan tinggi dengan jumlah 212 orang atau 24%. Tamatan SLTA dengan jumlah 345 orang atau 40%. Tamatan SLTP dengan jumlah 65 orang atau 7%. Tamatan SD dengan jumlah 48 orang atau 6%. Tidak tamat SD dengan jumlah 27 orang atau 3%. Belum tamat SD dengan jumlah 148 orang atau 17%. Belum dengan jumlah 25 orang atau 3%.

4.3.4 Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Salahsatunya adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling karena ketiganya mampumenjangkau segala lapisan masyarakat hingga daerah terpencil.

4.3.5 Pemerintahan Desa

Desa pulau padang terdiri dari 2 (dua) dusun atau lingkungan yaitu Dusun Koto Tuo dan Dusun Koto Tinggi, 2 (dua) rukun warga (rw) dan 5 (lima) rukun tetangga (rt). Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Pulau Padang tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak, mulai dari kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh lapisan masyarakat Desa Pulau Padang.

4.4 Visi Dan Misi Desa Pulau Padang

4.4.1 Visi

Adapun visi Desa Pulau Padang yaitu menciptakan sistem pemerintah desa yang kondusif dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa Pulau Padang Yang Bermusyawarah, jujur, transparan amanah dan sejahtera.

4.4.2 Misi

Misi desa pulau padang, untuk mewujudkan misi tersebut maka ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Menjalankan tugas sebagai kepala desa secara jujur dan profesional.
2. Mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabilitas.
3. Mengelola anggaran secara tepat, efektif untuk kemajuan dan kesejahteraan warga Desa Pulau Padang.
4. Menciptakan Pemerintahan Desa yang tertib, profesional serta memberikan pelayan terbaik kepada semua warga desa Pulau Padang.
5. Melaksanakan pembangunan fisik prasarana desa dan sosial kemasyarakatan berdasarkan kebutuhan.

6. Memproritaskan pembangunan sarana dan prasarana dalam kerangka otonomi Desa.
7. Menggali sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai sumber Pandapatan Asli Desa Pulau Padang yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemajuan Desa Pulau Padang.
8. Adanya transparasi keuangan yang baik yang berasal dari APBN, APBD maupun PAD.
9. Mengoptimalkan fungsi Kantor Kepala Desa sebagai sarana pelayanan masyarakat, kegiatan administrasi Desa, kegaiatan PKK dan Posyandu serta meningkatkan kerja aparatur Desa.
10. Akan selalu menjalin kebersamaan dan koordinasi dengan BPD dalam melaksanakan pemerintahan Desa
11. Melibatkan semua elemen seperti, tokoh masyarakat, cerdik pandai, toko agama, toko adat, kaum wanita dan para pemuda dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan dan kemajuan Desa.
12. Akan selalu menggali informasi dan koordinasi dengan pihak kecamatan, kabupaten dan pihak lainnya dalam percepatan dan mewujudkan pembangunan di Desa Pulau Padang
13. Akan memberatas penyakit masyarakat seperti judi, narkoba, kenakalan remaja dan premanisme
14. Selalau menjalin hubungan silahturahmi yang baik dalam kerja sama yang baik dengan desa tetangga demi kemajuan dan kebaikan bersama.
15. Meningkatkan pelayan pendidikan di Desa Pulau Padang.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berhasil desa pulau padang terdiri dari beberapa struktur:

4.5 Struktur Organisasi Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

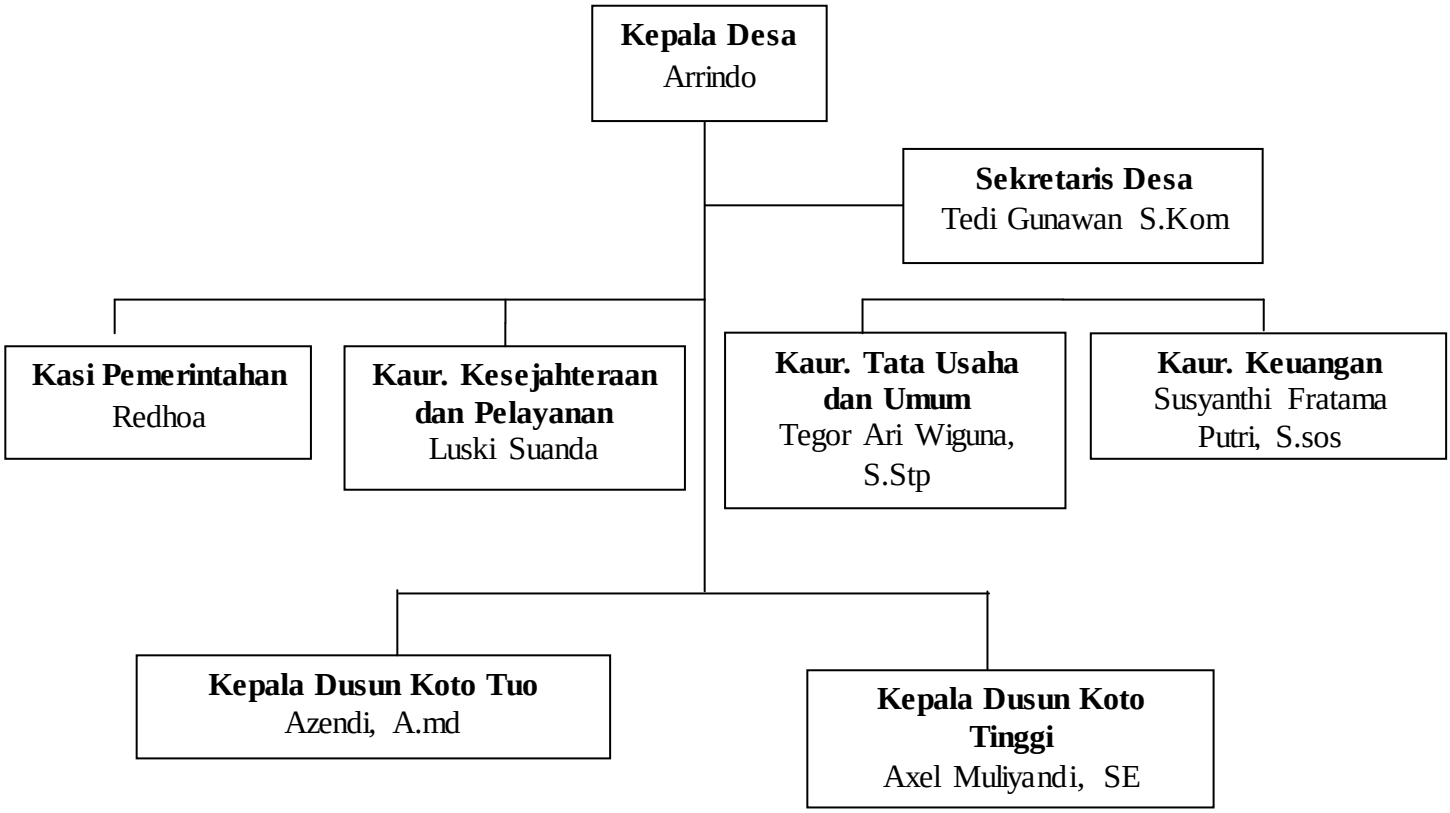

Sumber : Kantor Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah diadakan wawancara dan pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara dan pengamatan langsung maka dapat diperoleh berbagai data dari informan yang berjumlah 12 orang dalam kaitannya dengan Perananan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Data-data yang penulis peroleh dari data primer akan diuraikan sesuai dengan kenyataan di lapangan dan wawancara langsung kepada pihak terkait dengan Perananan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendapatkan gambaran mengenai responden, berikut dideskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia dan tingkat pendidikan.

5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil wawancara responden di dapati jenis kelamin responden sebagai berikut :

Tabel V.1 Identitas informan berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase %
1	Laki-Laki	10	83%
2	Perempuan	2	17%
Jumlah		12	100%

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2022

Bersadarkan tabel V.1 di atas dapat di lihat bahwa informan sebanyak 10 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang berjenis perempuan.

5.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia

Tingkat umur Informan dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel V.2 di bawah ini :

Tabel V.2 Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Umur

No	Tingkat Umur (tahun)	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	< 30	2	17%
2	31-40	6	50%
3	41-50	4	33%
4	>51	0	-
Jumlah		12	100%

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2022

Berdasarkan tabel V.2 dapat di lihat bahwa jumlah informan yang berumur kurang dari 30 tahun sebanyak 2 orang (17%), antara umur 31-40 tahun sebanyak 6 orang (50%), antara umur 41-50 sebanyak 4 orang (33%), dan tidak ada informan yang berumur lebih dari 50 tahun.

5.1.3 Identitas Informan Berdasarkan Jabatan Di BUMDes

Tabel V.3 Klasifikasi Informan Menurut Jabatan

No	**Nama**	**Jabatan di BUMDes**	**Jabatan di Desa**
1	Arrindo	Penasehat	Kepala desa
2	Tedi Gunawan	Penasehat	Sekretaris desa
3	Jumikan	Direktur bumdes	Direktur bumdes
4	Kosrianto	Kepala unit bumdes	Kepala unit bumdes
5	Ayot sudarso	Staff keuangan bumdes	Staff keuangan bumdes
6	Icuks	Penasehat	Ketua BPD
7	Wirawati		
8	Indra		
9	Heni		
10	Andi		
11	Riki		
12	Edo		

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Padang Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa dua orang yang memiliki jabatan di desa yaitu kepala desa dan sekretaris desa menjadi penasehat di bumdes. Sedangkan 1 dari BPD, dan 3 memiliki jabatan di bumdes. Enam orang masyarakat.

5.1.4 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun pendidikan informan dapat di lihat pada tabel V.3 berikut ini :

Tabel V.4 Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	SLTA	8	67%
2	Diploma	0	-
3	Strata I	4	33%
4	Strata II	0	-
Jumlah		12	100%

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2022

Pada tabel di atas dapat di jelaskan bahwa tingkat pendidikan SLTA sebanyak 11 orang (83.3%), dan Strata I sebanyak 1 orang (16.7%).

5.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan Perananan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

BUMDes adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. Ini merupakan jawaban sederhana bagi yang kerap bertanya mengenai apa itu BUMDes. Meski demikian, untuk memahami lebih lanjut mengenai pengertian BUMDes, sebaiknya pahami peraturan tentang BUMDes yang belum lama ini diterbitkan pemerintah mengenai BUMDes 2021. Regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 (PP 11 Tahun 2021) tentang Badan Usaha Milik Desa yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan secara detail mengenai apa itu Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa atau BUMDes.

BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa usaha BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes. Sedangkan Unit Usaha BUMDes atau Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa. Dalam peraturan tentang BUMDes ini, dijelaskan bahwa terdapat dua jenis BUMDes yang terdiri atas: BUM Desa BUM Desa bersama Baca juga: Mengenal Apa Itu Meterai Elektronik dan Bedanya dengan Meterai Tempel Fungsi BUMDes 2021 BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan

pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Maka untuk mengetahui Perananan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, penulis mengajukan beberapa pertanyaan yaitu:

5.2.1 Indikator

1. Indikator Pendekatan Dari Bawah (*Buttom Up Approach*)

1) Untuk mengetahui informasi dan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes, penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana Bapak/Ibu Selaku Pimpinan Menerapkan Pendekatan Kepada Masyarakat?

- Bapak Arrindo selaku Kepala Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, di daparkan bahwa:

  "Dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat pastinya perlu tindakan yang mendalam dan dilakukan secara langsung. Pendekatan secara langsung seperti contohnyanya menanyakan apa yang sedang dibutuhkan masyarakat saat ini, kebijakan serta tindakan apa yang diharapkan masyarakat kepada kami selaku pemerintahan desa".

- Bapak Tedi Gunawan, S.kom selaku sekretaris desa, didapatkan bahwa:

"Untuk pendekatan sendiri kita memang menggunakan pendekatan secara langsung kepada masyarakat"

- Bapak Jumikan,S.Ikom selaku direktur BUMDes Asa Mandiri, di dapatkan pernyataan yaitu:

  "Saya selaku direktur bumdes berusaha melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung bahwasannya BUMDes ini banyak manfaatnya untuk masyarakat desa ini"

Pendekatan kepada masyarakat sudah dilakukan baik dari pihak kepala desa maupun pihak pengelola BUMDes itu sendiri. Pernyataan di atas dapat di tarik kesimpulan pemerintahan desa dalam melakukan pendekatan dengan cara pendekatan secara langsung, untuk mengetahui keinginan dari masyarakat dalam berjalannya pemerintahan di desa pulau padang.

2) Untuk mengetahui informasi dan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes, penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Pendekatan seperti apa yang dilakukan kepada masyarakat?

- Wawancara yang dilakukan kepada bapak Tedi Gunawan, S.kom selaku Sekretaris Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

  "Dengan cara merangkul masyarakat secara langsung dalam kegiatan yang ada di desa, sehingga kedekatan antara pemerintah desa dan masyarakat terjalin erat"

- Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Jumikan,S.Ikom selaku direktur BUMDes Asa Mandiri, didapatkan pernyataan sebagai berikut:

  "Jika ditanya pendekatan seperti apa, ya pastinya pendekatan yang memang secara langsung kepada setiap masyarakat, misalkan mengajak langsung masyarakat jika ada kegiatan yang diadakan di desa ataupun kegiatan yang menyangkut dengan BUMDes"

- Wawancara yang dilakukan kepada Arrindo selaku kepala desa di desa pulau padang, di dapatkan pernyataan sebagai berikut:

  "Pendekatan yang dilakukan oleh perangkat desa ataupun perangkat bumdes itu sudah sangat sampai kepada masyarakat yaitu dengan langsung melakukan pendekatan, sehingga antara pemerintah desa, bumdes terjalin kedekatan yang kuat.

Hasil pernyataan di atas ditarik simpulan bahwa pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat yaitu merangkul secara langsung sehingga pendekatan terjalin dengan erat. Sehingga kerja sama antara masyarakat, desa dan BUMDes terjalin dengan baik.

3) Untuk mengetahui informasi dan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes, penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana cara bapak/ibu dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat yang membuat masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan.

- Wawancara peneliti kepada Arrindo selaku kepala desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

  "Dalam hal pendekatan meminta partisipasi masyarakat dalam ikut serta memberi ide-ide pemberdayaan seperti apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini dalam kemajuan dan perkembangan desa dan kemajuan BUMDes Asa Mandiri, sehingga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terlaksana dengan baik dan masyarakat aktif ikut serta dalam pemberdayaan tersebut".

- Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Jumikan, S.Ikom selaku Direktur BUMDes Asa Mandiri, didapatkan hasil:

  "Biasanya saya memberikan himbauan dan memberikan undangan di setiap kegiatan yang ada di desa yang menyangkut dengan BUMDes, sehingga pendekatan itu terjalin".

- Wawancara peneliti kepada Tedi Gunawan, S.kom selaku sekretaris desa pulau padang didapatkan:

  "Dari pihak desa saya konfirmasikan jika ada agenda acara selalu memberikan undangan kepada masysrakat yang bekerja sama dengan rt/rw untuk mendata siapa saja yang akan diberikan undangan".

Menurut pandangan saya di lapangan perangkat desa dan bumdes dalam mensosialisasikan atau mengenalkan pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes Asa Mandiri dilakukan pendekatan secara langsung yaitu dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, mendengarkan aspirasi mayarakat, sehingga pendekatan yang dilakukan berjalan dengan baik.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pendekatan yang dilakukan di masyarakat tetap dalam teknik merangkul, agar terjalinnya kedekatan antara masyarakat dengan pemerintahan desa yang akan membuat kegiatan yang di adakan mayarakat selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

2. Indikator Partisipasi (*participation*)

1) Untuk mengetahui informasi dan partisipasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes, penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana pemerintahan desa dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pemberian pemberdayaan yang telah direncanakan dan apakah ada kriteria khusus dalam pemilihan masyarakat sebagai penerima pemberdayaan yang akan dilakukan?

- Wawancara kepada Jumikan, S.Ikom selaku Direktur BUMDes Asa Mandiri, didapatkan hasil:

"Dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Asa Mandiri dari pengelolah BUMDes mendata masyarakat yang mana tepat sasaran dalam pemberdayaan yang akan dilakukan, misalkan dalam pemberdayaan masyarakat dalam pemberian pupuk dalam pengelolan pertanian, pengelola BUMDes mencari dan memilih bapak-bapak mana yang layak dalam pemberian pemberdayaan"

- Wawancara yang dilakukan kepada Tedi Gunawan, S.kom, selaku sekretaris desa pulau padang, didapatkan hasil:

  "Untuk kriteria biasanya kami dan pengurus BUMDes mendata bapak-bapak yang berminat dalam mengikuti pemberdayaan yang dilaksanakan BUMdes. Untuk kriteria khusus tidak ada hanya saja mungkin lebih kepada masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan dan bantuan di desa ini".

- Wawancara yang dilakukan kepada Arrindo selaku kepala desa pulau padang, didapatkan hasil:

  "Biasanya tidak ada kriteria khusus ya, Cuma kami selaku penasehat hanya memberikan saran saja mana yang seharusnya diberikan pemberdayaan".

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengikuti pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes Asa Mandiri. Tidak perlu kriteria khusus untuk yang ingin ikut serta dalam pemberdayaan yang di adakan.

2) Untuk mengetahui informasi dan partisipasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes, penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana cara pemerintahan desa dalam mengatasi jika ada masyarakat yang sudah diundang untuk diberikan pemberdayaan menolak dijadikan partisipan dalam pemberdayaan tersebut?

- Wawancara yang dilakukan kepada Arrindo kepala desa Pulau Padang, di dapatkan hasil:

  "Bagi masyarakat yang sudah di daftarkan menjadi anggota pemberdayaan tetapi menolak menjadi partisipan atau tidak datang biasanya salah satu petugas desa dan petugas BUMDes untuk menanyakan apa alasan

masyarakat yang tersebut tidak mau ikut serta dalam pemberdayaan. Dan sebisa mungkin kita kasih edukasi laggi bahwa pemberdayaan ini bagus untuk kedepannya".

- Wawancara yang dilakukan kepada Tedi Gunawan sebagai sekretaris desa Pulau Padang, di dapatkan hasil:

  "Biasanya jika sudah 2 kali ada kegiatan tetapi masyarakat tersebut tidak juga menghadiri maka kami mengkoordinasikam kepada perangkat bumdes untuk menanyakan ke yang bersangkutan apa bisa diajak untuk melakukan pemberdayaan. Jika tidak berarti kami mencari pengganti masyarakat lain yang mau mengikuti kegiatan atau pemberdayaan tersebut".

- Wawancara yang dilakukan kepada Jumikan selaku direktur BUMDes Pulau Padang, di dapatkan hasil:

  "Sesuai intruksi penasehat bumdes, jika sudah dua kali diundang tetapi tidak juga mau mengahadiri kegiatan dengan alasan yang tidak tepat maka kami akan mengganti masyarakat tersebut".

Menurut pandangan saya di lapangan jika masyarakat diberikan undangan untuk mengikuti rapat ataupun pemberdayaan tetapi tidak ada respon dari masyarakat yang bersangkutan sampai dua kali tiding menanggapi maka masyarakat tersebut dicoret dari daftar penerima pemberdayaan.

Dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa jika ada masyarakat yang tidak datang saat pelaksanaan pemberdayaan akan ditinjau ulang oleh petugas pemerintah desa dan petugas dari BUMDes. Dan jika tidak memungkinkan untuk ikut serta dalam kegiatan akan dicari pengganti yang memang membutuhkan dan mau berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.

3. Indikator Konsep Keberlanjutan

1) Untuk mengetahui informasi dan konsep berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes, penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana tanggapan masyarakat tentang berdirinya BUMDes di Desa Pulau Padang.

- Hasil wawancara yang dilakukan kepada Wirawati selaku masyarakat di desa pulau padang, di dapatkan:

  "*Menurut saya dengan berdirinya BUMDes di desa ini sangat membantu ya, selain dengan melengkapi kebutuhan masyarakat, BUMDes juga bisa membantu masyarakat dalam mengembangkan bakat maupun memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa dimanfaatkan masyarakat seperti saya contohnya sebagai IRT, dengan adanya pemberdayaan yang diberikan kepada ibu-ibu itu sangat membantu".*

- Hasil wawancara yang dilakukan kepada heni selaku masyarakat di desa pulau padang, di dapatkan:

  "*Untuk pemberdayan yang diberikan oleh bumdes yang bekerja sama dengan pemerintahan desa pulau padang menurut saya sangat membantu, apalagi untuk para remaja seperti saya , dimana bisa mengembangkan bakat dan kepandaian pada pemberdayaan yang diberikan"*

- Hasil wawancara yang dilakukan kepada riki selaku masyarakat di desa pulau padang, di dapatkan:

  "*Selama ini untuk pemberdayaan sangat membantu bagi masyarakat"*

- Hasil wawancara yang dilakukan kepada edo selaku masyarakat di desa pulau padang, di dapatkan:

  "*Kegiatan dan pemberdayaan yang dilakukan BUMDes yang berkoordinasi dengan pemerintah desa sangat membantu. Dan dari beberapa yang saya lihat penerima pemberdayaan itu ada yang terbantu untuk menimbulkan ide ataupun pekerjaannya"*

- Hasil wawancara yang dilakukan kepada Andi selaku masyarakat di desa pulau padang, di dapatkan:

  "Keberadaan BUMDes di desa ini menurut saya sangat membantu dan berdampak positif dalam membangun desa pulau padang ini"

– Hasil wawancara yang dilakukan kepada indra selaku masyarakat di desa pulau padang, di dapatkan:

"Dengan adanya bumdes ini menurut saya adalah langkah untuk memudahkan masyarakat, selain memberikan pemberdayaan juga memberikan kemudahan masyarakat dalam mencari perlengkapan untuk berkebun"

Menurut pandangan saya di lapangan dari tanggapan dan komentar masyarakat dengan adanya BUMDes dan pemberdayaan BUMDes ini sangat membantu bagi masyarakat yang ingin menambah penghasilan tetapi tidak cukup dana dalam mengikuti pelatihan.

Dapat diambil kesimpulan dari beberapa jawaban dari masyarakat desa pulau padang yaitu dari pelaksanaan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa dan bumdes sangat membantu dan sangat bermanfat dari apa yang sudah dilakukan.

4. Indikator Keterpaduan

1) Untuk mengetahui informasi dan keterpaduan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes, penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Apakah ada strategi khusus yang dilakukan pemerintah desa dalam pemberian pemberdayaan kepada masyarakat?

– Wawancara yang dilakukan kepada Jumikan,S.Ikom selaku direktur BUMDes Asa Mandiri, didapatkan:

"*Dalam pembuatan strategi ataupun suatu perencanaan untuk pemberdayaan dilakukan dulu rapat dengan berbagai perangkat desa yang terhubung, agar kami dari pihak penyambung tangan masyarakat tahu akan potensi apa yang seharusnya di kembangkan dan potensi apa yang seharusnya lebih di dahulukan untuk mencapai target yang akan di tujuh"*

- Wawancara yang dilakukan kepada Kosrianto selaku Kepala unit BUMDes Desa Pulau Padang, didapatkan:

  "*Pemberdayaan yang akan dilakukan, bukan semata-mata diberikan tanpa ada target dan capaian kedepannya. Melainkan bagaimana pemberdayaan yang dilakukan itu berhasil dan membuahkan hasil bagi masyarakat*".

Dari pernyatan di atas dapat disimpulkan bahwa, pemerintahan desa juga memiliki strategi khusus dalam pengembangan masyarakat. Agar tercapainya target pemberdayaan yang akan diberikan, dan mengingkatkan kompetensi pada masyarakat desa.

2) Untuk mengetahui informasi dan keterpaduan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes, penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Apakah saja kebijakan pemerintah desa dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat ini.

- Wawancara yang dilakukan kepada Jumikan,S.Ikom selaku direktur BUMDes Asa Mandiri, didapatkan:

  "*Kebijakan desa yang ada dalam pemberdayaan ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan bisa mencapai hasil yang optimal"*

- Wawancara yang dilakukan kepada Kosrianto selaku Kepala unit BUMDes Desa Pulau Padang, didapatkan:

  "*Setiap rapat bulanan yang dilakukan selalu membahas bagaimana kinerja yang kami berikan baik dari pemerintah desa dan bumdes ini sendiri memberikan dampak positif kepada setiap masyarakat* ".

Menurut pandangan saya di lapangan pemberdayaan dilakukan memang menurut apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang dibutuhkan masyarakat, bukan semata-mata hanya pelaksanaan saja.

Dari pernyatan di atas dapat disimpulkan bahwa, pemerintahan desa dan bumdes selalu mengkaji ulang dalam kebiajakan yang akan dilakukan untuk masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan bisa tercapai dan membawakan hasil bagi masyarakat

5. Indikator keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan

1) Untuk mengetahui informasi keuntungan sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes, penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana bapak/ibu mengetahui apakah pemberdayaan masyarakat yang diberikan berhasil atau tidak?

- Wawancara yang dilakukan kepada Jumikan, S.Ikom selaku Direktur BUMDes, di dapatkan hasil:

  "Berhasil atau tidaknya dapat dilihat perputaran fenomena di desa. Seperti terlaksananya oleh beberapa anggota pemberdayaan apa yang diberikan pada waktu pemberdayaan.Dengan keberadaan BUMDes ini masyarakat tidak perlu jauh keluar lagi untuk mencari perlengkapan pertanian"

- Wawancara yang dilakukan kepada Ayot Sudarso, S.Pd.i , di dapatkan hasil:

  "Ya sangat perlu dilakukan kajian ulang dalam pemberdayaan tersebut. Dikarenakan pemerintahan desa harus mengetahui keberhasilan dari pemberdayaan berjalan atau tidaknya karena ini penting untuk kemajuan suatu desa.

Menurut pandangan saya di lapangan setelah dilakukan pemberdayaan pengelola BUMDes dan pemerintah desa membuat kaji ulang dalam pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan.

Pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan berhasil atau tidaknya sebuah pemberdayaan yang dilakukan pemerintahan desa yaitu dalam bentuk memenuhi kebutuhan yang ada. Dan perlu kajian ulang tentang pemberdayaan yang telah dilakukan dan tidak bisa lepas tangan begitu saja.

2) Untuk mengetahui informasi keuntungan sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes, penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Apakah setelah dilakukan pemberian pemberdayaan kepada masyarakat, pemerintah desa melakukan kajian ulang untuk mengetahui keberhasilan pemberdayaan yang sudah diberikan?

- Wawancara yang dilakukan kepada icuk sebagai ketua BPD, di dapatkan hasil:

  "Sebagian masyarakat cukup aktif dalam keikutsertaan dengan program dan kegiatan yang diadakan oleh BUMDES, sebagiannya lagi mungkin terkendala dalam mengikuti beberapa program BUMDES dikarenakan juga harus bekerja masing-masing"

- Wawancara yang dilakukan kepada Kosrianto sebagai kepala unit bumdes , di dapatkan hasil:

  "Setiap setelah diberikan pemberdayaan kami pengelola bumdes dengan penasehat selalu membuat agenda untuk melakukan kajian ulang pemberdayaan yang telah diberikan berapa persen tingkat keberhasilan yang sudah didapatkan"

Menurut pandangan saya di lapangan setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat cukup aktif, banyak masyarakat yang diundang datang ke acara tersebut.

Pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan disetiap pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah desa sebagai penasehat dan pengelola bumdes selalu melakukan rapat terkait keberhasilan bumdes dalam melaksanakan pemberdayaan. Dan sekitar 90 % BUMDes telah melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat di desa Pulau Padang.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara kepada 12 responden, diketahui bahwa jawaban tentang pemberdayaan perekonomian masyarakat oleh BUMDes Asa Mandiri Desa Pulau Padang didapatkan bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya pemberdayaan yang diberikan BUMDes Asa Mandiri ini, sehingga pencapaian dalam pemberian pemberdayaan bisa dikatakan tercapai.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, Perananan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Dalam pemberdayakan Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan adanya BUMDes di Desa Pulau Padang banyak memberikan dampak baik sekali bagi masyarakat di Desa Pulau Padang baik di dalam bidang pertanian dan perkebunan seperti harga lebih terjangkau dan sesuai dengan ekonomi masyarakat.

Dalam hal ini pemerintahan desa dan pengelola BUMDes baik sekali dalam malakukan peranan dalam pemberdayaan masyarakat di Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

6.2 Saran

Berdasarkn kesimpulan diatas di ajukan saran sebagai berikut :

6.2.1 Pemerintahan Desa

Diharapkan kepada pemerintahan desa lebih menggiatkan lagi dalam pemberian pemberdayaan kepada masyarakat dan sosialisasikan bahwasannya pendirian BUMDes ini untuk memenuhi kebutuhan dari segala macam seperti pada perkebunan dan pertanian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anom Surya Putra. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa.* Jakarta: kementerian desa, pembangunan desa tertinggal dan trasmigrasi RI

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta

Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes), (Departemen pendidikan nasional: Pusat kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi Universitas Brawijaya, 2007)

Kartono dan Kartini. 2009. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Tjiptono, Fandi. 2005. *Strategi Pemasaran.* Yogjakarta: Andi Offset

Kartohadikusumo, Spetardjo. 1988. *Desa*. Yogyakarta: Sumur Bandung

Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa.* Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nawawi, H. Hadari. 2003. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi.* Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi* (*Ilmu Pemerintahan Baru*). Jilid 1-2. Jakarta: Rineka Cipta

Newman, W. Laurence. 2018, *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks Permata Putri Media.

Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2012. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Limgkungan.* Jakata: LP3ES

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Moejiarto. Tjokrowinoto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Manan, Abdul. 2003. *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan* . Medan: Pustaka Bangsa Press

Rukayat, Yayat. 2021. *Manajemen Pemerintahan Desa & Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka

Rusiana, Dita Angga. 2017. *Bumdes Motor Penggerak Desa*.

Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju

Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Soekanto, Soerjono. 2001. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara

Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama

Sumpeno, W. 2015. *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh. Read

Sofian. 2003. *Sistem Perencanaan Strategi Dalam Pembangunan*. UIR Press

Syafiie. Inu Kencana. 2003. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama

Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka

Purnomo, Joko. 2006. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest

Wahyudin kessa. 2015. *Perencanaan pembangunan desa*. Jakarta: kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia

Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa dan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Press

Yustika, Ahmad Erani. 2015. *Perpektif Baru Pembangunan Indonesia*. Malang: Brawijaya University Pres and P3BE

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Identitas Peneliti

Nama	: FERNANDO
NPM	: 180411025
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial
Jenjang Pendidikan	: S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

Nama	:
Jenis Kelamin	:
Usia	:
Alamat	:
Status Pendidikan	:
Jabatan	:

C. PEDOMAN WAWANCARA

b) Wawancara ini dimaksudkan hanya untuk penulisan skripsi dan syarat pengumpulan data informasi sehubung dengan penulisan ilmiah.

c) Hasil dan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/I, akan sangat dijaga kerahasiaannya, karena kejujuran dalam menjawab sangat kami harapkan.

d) Identitas Bapak/Ibu/Sdr/i dijamin kerahasiaannya.

e) Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sdr/i saya harapkan terimakasih.

D. Daftar Pertanyaan Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Asa Mandiri Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi:

I. Indikator Pendekatan Dari Bawah (*Buttom Up Approach*)

1. Bagaimana bapak/ibu selaku pimpinan menerapkan pendekatan kepada masyarakat ?

   ……
   ……
   ……

2. Pendekatan seperti apa yang dilakukan kepada masyarakat ?

   ……
   ……
   ……

3. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan pendekatan kepada masyarakat yang membuat masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan ?

   ……
   ……
   ……

II. Indikator pertisipasi (*participation*)

1. Bagaimana pemerintahan desa dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pemberian pemberdayaan yang telah di rencanakan dan apakah ada kriteria khusus dalam pemilihan masyarakat sebagai penerima pemberdayaan yang akan dilakukan?

……
……
……

2. Bagaimana cara pemerintahan desa dalam mengatasi jika ada masyarakat yang sudah diundang untuk diberikan pemberdayaan tetapi menolak dijadikan partisipan dalam pemberdayaan tersebut?

……
……
……

III. Indikator konsep keberlanjutan

1 Bagaimana tanggapan masyarakat tentang berdirinya BUMDes di Desa Pulau Padang?

……
……
……

IV. Indikator Keterpaduan

1. Apakah ada strategi khusus yang dilakukan pemerintahan desa dalam pemberian pemberdayaan kepada masyarakat?

……
……
……

2. Apakah saja kebijakan pemerintah desa dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat ?

……
……

……

V. Indikator Keuntungan Sosial Dan Ekonomi

1. Bagaimana bapak/ibu mengetahui apakah pemberdayaan masyarakat yang diberikan berhasil atau tidak ?

   ……
   ……
   ……

2 Apakah setelah dilakukan pemberian pemberdayaan kepada masyarakat, pemerintah desa melakukan kajian ulang untuk mengetahui keberhasilan pemberdayaan yang sudah diberikan?

   ……
   ……
   ……

DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : FERNANDO

Tempat Tanggal Lahir : Pulau Padang, 22 Februari 2000

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Status : Mahasiswa

Alamat : Desa Pulau Padang, Kecamatan Singingi
Kabupaten Kuantan Singingi

Pendidikan : 1. Sekolah Dasar (SD) 003 Pulau Padang
Kecamatan Singingi Tahun (2006-2012)
2. Sekolah Menegah Pertama (SMP) 1 Singingi
Kecamatan Singingi Tahun (2012-2015)
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) 1
Singingi Kecamatan Singingi
Tahun (2015-2018)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 01 Agustus 2022

Penulis,

FERNANDO
NPM.180411025